

THE POLITICAL STRATEGY OF REGIONAL LEADERS IN VILLAGE DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF REGENT IBRAHIM ALI'S LEADERSHIP IN TANA TIDUNG REGENCY

STRATEGI POLITIK KEPALA DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DESA: STUDI KASUS KEPEMIMPINAN BUPATI IBRAHIM ALI DI KABUPATEN TANA TIDUNG

Edy Selvianus Malisan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

*edysmalisan@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to analyze the political strategy of Regent Ibrahim Ali in village development in Tana Tidung Regency, including the pattern of institutional coordination and political communication with stakeholders, as well as the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study employs a qualitative approach using a single case study method, with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies, analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña (2014), comprising data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. The results indicate that the success of village development in Tana Tidung Regency is supported by a political strategy oriented toward five main dimensions: participatory development policy formulation, strengthened cross-sectoral coordination, effective political communication, mobilization of resources and budgets, and collaboration among local government, village government, and the community. Nevertheless, the effectiveness of strategy implementation remains constrained by limited basic infrastructure, low human resource capacity among village apparatus, and archipelagic and border geographical conditions that hinder inter-regional connectivity. This study produces a model of regional head political strategy that can serve as a reference for strengthening participatory, adaptive, and sustainable village development governance, particularly in newly established autonomous regions with archipelagic and border characteristics.

Keywords: *political strategy; regional head; village development; institutional coordination; political communication*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi politik Bupati Ibrahim Ali dalam pembangunan desa di Kabupaten Tana Tidung, meliputi pola koordinasi kelembagaan dan komunikasi politik dengan para pemangku kepentingan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal (single case study), yang datanya dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa di Kabupaten Tana Tidung ditopang oleh strategi politik yang berorientasi pada lima dimensi utama, yaitu perumusan kebijakan pembangunan yang partisipatif, penguatan koordinasi lintas sektor, komunikasi politik yang efektif, mobilisasi sumber daya dan anggaran, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas implementasi strategi tersebut masih dibatasi oleh keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, serta kondisi geografis kepulauan dan kewilayahan yang menyulitkan konektivitas antar wilayah. Penelitian ini menghasilkan model strategi politik kepala daerah yang dapat menjadi rujukan bagi penguatan tata kelola pembangunan desa yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan, khususnya pada daerah otonom baru dengan karakteristik geografis kepulauan dan perbatasan.

Kata Kunci: *strategi politik; kepala daerah; pembangunan desa; koordinasi kelembagaan; komunikasi politik*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan pengakuan atas otonomi desa serta memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan (Eko et al., 2014). Dalam kerangka desentralisasi tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Strategi politik kepala daerah dengan demikian dapat tercermin melalui penetapan prioritas pembangunan, pengalokasian sumber daya, konsolidasi birokrasi, koordinasi antar lembaga, pembinaan pemerintah desa, dan penguatan partisipasi masyarakat.

Kajian mengenai hubungan antara kepemimpinan politik kepala daerah dan pembangunan desa menjadi penting karena kebijakan pembangunan pada dasarnya tidak semata-mata ditentukan oleh aspek administratif dan teknokratis, tetapi juga oleh dinamika kepemimpinan dan politik lokal (Alim, 2024; El Yana, 2025). Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa tata kelola desa di Indonesia sangat beragam antarwilayah dan sangat dipengaruhi oleh karakter kepemimpinan lokal, pola akuntabilitas, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan desa (Ruhyanto, 2025). Studi lain juga menegaskan bahwa implementasi otonomi desa pasca-2014 memunculkan pola hubungan yang kompleks antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, yang tidak jarang mereplikasi corak kepemimpinan teknokratis-hierarkis dari tingkat nasional ke tingkat lokal (Antlöv & Wetterberg, 2022).

Kabupaten Tana Tidung, sebagai salah satu daerah otonom baru di Provinsi Kalimantan Utara, memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang khas serta menghadapi tantangan struktural dalam mempercepat pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan konektivitas antar wilayah, ketersediaan infrastruktur dasar, akses masyarakat terhadap pelayanan publik, kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan aktivitas ekonomi produktif berbasis potensi lokal. Kondisi kewilayahan yang didominasi oleh aliran sungai, kawasan hutan, dan permukiman yang tersebar memperkuat urgensi strategi politik yang adaptif dalam mendorong pemerataan pembangunan desa.

Pembangunan desa di Kabupaten Tana Tidung menjadi semakin menarik untuk dikaji apabila dilihat dari berbagai capaian dan prestasi yang diperoleh desa maupun lembaga masyarakat desa dalam beberapa tahun terakhir, yang mencakup bidang tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, inovasi, serta penguatan sistem informasi pemerintahan desa (Aditya, 2026). Capaian tersebut mengindikasikan adanya keterkaitan antara pola kepemimpinan politik kepala daerah dan efektivitas implementasi kebijakan pembangunan di tingkat desa, sebagaimana ditunjukkan pula oleh temuan pada konteks kabupaten lain di Kalimantan bahwa kepemimpinan kepala daerah yang responsif berkontribusi terhadap percepatan kemandirian desa (Marwantho, 2021).

Kajian pembangunan desa selama ini lebih banyak berfokus pada pengelolaan Dana Desa, pemberdayaan masyarakat, kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan desa (Ginting et al., 2023; Hariyati et al., 2021), sementara kajian yang secara khusus menghubungkan strategi politik kepala daerah dengan kepemimpinan politik, koordinasi kelembagaan, komunikasi politik, hubungan pemerintah daerah-desa, serta partisipasi masyarakat masih relatif terbatas dikembangkan, khususnya pada konteks daerah otonom baru dengan karakteristik kepulauan dan perbatasan seperti Kabupaten Tana Tidung. Kesenjangan (research gap) inilah yang menjadi landasan bagi penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis strategi politik Bupati Ibrahim Ali dalam pembangunan desa di Kabupaten Tana Tidung melalui penetapan agenda pembangunan, koordinasi kelembagaan, komunikasi politik, dan penguatan partisipasi masyarakat; (2) mengidentifikasi pola koordinasi kelembagaan dan komunikasi

politik dengan para pemangku kepentingan; serta (3) menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi strategi tersebut. Secara akademik, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kajian politik lokal dan pembangunan desa, khususnya dalam mengintegrasikan perspektif strategi sebagai pola tindakan (*strategy as pattern*) dari Mintzberg (1978) ke dalam analisis kepemimpinan politik daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan daerah otonom baru lainnya dalam memperkuat tata kelola pembangunan desa yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*), sebagaimana dikembangkan oleh Creswell dan Creswell (2017). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami strategi politik kepala daerah secara mendalam melalui fakta empiris, interaksi sosial, proses pengambilan keputusan, dan relasi kelembagaan yang sulit dijelaskan secara kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi menyeluruh terhadap tindakan, strategi, dan kebijakan yang diterapkan dalam pembangunan desa (Locke, 2002).

Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu aktor politik dan satu wilayah tertentu, yaitu strategi politik Bupati Ibrahim Ali dalam pembangunan desa di Kabupaten Tana Tidung. Studi kasus memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji fenomena secara holistik dan kontekstual berdasarkan data wawancara, observasi, dan dokumen resmi, sehingga interaksi antara aktor, kebijakan, dan konteks kewilayahan dapat dipahami secara komprehensif.

2.1 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Subjek penelitian meliputi Bupati Tana Tidung beserta unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala desa dan perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan tokoh adat, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat program pembangunan desa. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam proses perumusan kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan pelaksanaan program pembangunan desa.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang bersifat semi-terstruktur dengan informan kunci; (2) observasi partisipatif terhadap kegiatan koordinasi, forum musyawarah perencanaan pembangunan, dan kunjungan lapangan; serta (3) studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan desa, peraturan daerah, laporan capaian program, serta pemberitaan media terkait pembangunan desa di Kabupaten Tana Tidung.

2.3 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri atas tiga tahap: (1) kondensasi data (*data condensation*), yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; (2) penyajian data (*data display*), yaitu pengorganisasian data ke dalam bentuk naratif dan matriks tematik untuk memudahkan interpretasi pola hubungan antar variabel; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yaitu proses interpretasi makna dari pola data yang telah disajikan untuk menghasilkan temuan penelitian yang sah. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Politik Bupati Ibrahim Ali sebagai Pola Tindakan

Pembangunan desa pada masa kepemimpinan Bupati Ibrahim Ali di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan adanya keterkaitan erat antara strategi politik kepala daerah dan kapasitas pemerintahan dalam mengarahkan pembangunan. Berdasarkan temuan penelitian, strategi politik yang dijalankan tidak semata-mata berorientasi pada pemeliharaan kekuasaan (power maintenance), tetapi juga diarahkan untuk mengonversi legitimasi dan otoritas politik menjadi kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Orientasi ini terlihat melalui upaya mengakomodasi aspirasi masyarakat, membangun komunikasi intensif dengan pemerintah desa, memperkuat koordinasi antar organisasi perangkat daerah, serta mengoptimalkan sumber daya pembangunan.

Temuan tersebut relevan dianalisis menggunakan pemikiran Mintzberg (1978), yang memandang strategi sebagai pola tindakan (pattern) yang terbentuk dari rangkaian keputusan dan tindakan dalam merespons dinamika lingkungan, bukan semata-mata sebagai rencana (plan) yang disusun secara formal-deduktif. Dalam konteks Kabupaten Tana Tidung, berbagai tindakan kepala daerah menunjukkan adanya pola strategis yang menghubungkan kekuasaan politik dengan praktik pemerintahan dan pembangunan desa secara konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian, strategi politik kepala daerah tidak hanya dipahami sebagai instrumen untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan politik sebagaimana ditekankan dalam kajian komunikasi politik konvensional (McNair, 2017; Nimmo, 2008), tetapi juga sebagai mekanisme konversi legitimasi politik menjadi kapasitas pemerintahan yang menghasilkan kebijakan pembangunan yang konkret.

3.2 Pola Koordinasi Kelembagaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola koordinasi kelembagaan dalam pembangunan desa di Kabupaten Tana Tidung berlangsung melalui tiga jalur utama, yaitu koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, dan koordinasi partisipatif. Koordinasi vertikal dilakukan melalui hubungan hirarkis antara kepala daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pemerintah desa dalam menerjemahkan kebijakan daerah ke dalam program pembangunan yang operasional di tingkat desa. Koordinasi horizontal berlangsung melalui kerja sama antar-OPD, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan serta melaksanakan program pembangunan secara lintas sektor.

Pola koordinasi tersebut sejalan dengan kerangka collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menekankan pentingnya forum kolaboratif formal yang melibatkan aktor negara dan non-negara secara konsensual untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih legitimate dan implementatif. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa menjadi salah satu ruang kolaboratif utama yang mempertemukan pemerintah desa dan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya pembangunan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan forum kolaboratif tersebut sangat bergantung pada komitmen bersama seluruh peserta untuk memprioritaskan kepentingan pembangunan yang lebih luas dibandingkan kepentingan sektoral atau individual.

3.3 Komunikasi Politik dengan Pemangku Kepentingan

Komunikasi politik Bupati Ibrahim Ali dengan pemerintah desa dan masyarakat dilaksanakan melalui saluran formal dan informal, seperti rapat koordinasi, forum perencanaan pembangunan, kunjungan lapangan, dan komunikasi interpersonal. Pola komunikasi tersebut berperan penting dalam membangun kepercayaan (trust building), memperlancar penyampaian kebijakan, serta mendukung implementasi program pembangunan di tingkat

desa. Temuan ini memperkuat argumen McNair (2017) bahwa komunikasi politik yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyampaian pesan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan legitimasi dan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Meskipun demikian, temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa efektivitas komunikasi politik tersebut masih cenderung bertumpu pada relasi personal kepala daerah dengan aktor-aktor di tingkat desa, dan belum sepenuhnya melembaga dalam sistem komunikasi pemerintahan yang formal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko keberlanjutan (*sustainability risk*) apabila terjadi pergantian kepemimpinan politik di tingkat daerah, sebagaimana juga diperingatkan dalam studi mengenai variasi rezim tata kelola desa di berbagai wilayah Indonesia (Ruhyanto, 2025).

3.4 Mobilisasi Sumber Daya dan Anggaran

Strategi mobilisasi sumber daya dan anggaran tercermin melalui dukungan kepala daerah terhadap program pembangunan desa, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sinergi dengan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Studi terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang efektif memerlukan sistem pengawasan internal pemerintah daerah yang kuat serta tata kelola yang transparan dan akuntabel (Aditya, 2026), sekaligus manajemen risiko yang memadai dalam administrasi keuangan desa (Ginting et al., 2023). Dalam konteks Kabupaten Tana Tidung, dukungan politik dan fiskal dari kepala daerah menjadi salah satu prasyarat penting bagi optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi lokal.

3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Faktor pendukung utama dalam implementasi strategi politik pembangunan desa di Kabupaten Tana Tidung meliputi komitmen kepemimpinan kepala daerah, tersedianya forum koordinasi formal antara pemerintah daerah dan desa, serta tingginya modal sosial masyarakat berupa gotong royong dan solidaritas komunal. Sebaliknya, faktor penghambat utama meliputi keterbatasan infrastruktur dasar terutama konektivitas antar wilayah, rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, kondisi geografis kewilayahan yang didominasi aliran sungai dan kawasan hutan, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Temuan ini konsisten dengan kajian pembangunan desa secara nasional yang menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan manajemen risiko pengelolaan Dana Desa masih menjadi kendala struktural di banyak daerah otonom baru di Indonesia (Ginting et al., 2023).

3.6 Model Strategi Politik Kepala Daerah dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan temuan tersebut, strategi politik Bupati Ibrahim Ali dalam pembangunan desa dapat dipahami sebagai strategi yang integratif dan multidimensional, yang mencakup lima dimensi utama: (1) perumusan kebijakan pembangunan yang partisipatif; (2) komunikasi politik yang efektif dengan pemerintah desa dan masyarakat; (3) koordinasi kelembagaan lintas sektor secara vertikal dan horizontal; (4) mobilisasi sumber daya dan anggaran; serta (5) pembangunan legitimasi politik melalui capaian pembangunan dan inovasi desa. Kelima dimensi tersebut saling berkaitan dan membentuk pola tindakan strategis yang memungkinkan kepala daerah menghubungkan otoritas politik dengan kepentingan pembangunan masyarakat.

Dalam perspektif Mintzberg (1978), pola tindakan tersebut menunjukkan bahwa strategi politik tidak hanya ditentukan oleh keputusan formal, tetapi juga oleh konsistensi tindakan yang dilakukan dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Strategi politik dapat menjadi instrumen produktif bagi pembangunan apabila otoritas politik digunakan untuk memperkuat partisipasi, koordinasi, pemerataan sumber daya, dan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, apabila lebih dominan diarahkan pada kepentingan elektoral jangka pendek, strategi politik berpotensi menjadikan pembangunan sebagai instrumen politik semata, sebagaimana

diperingatkan dalam kajian mengenai kecenderungan otoritarianisme baru dalam tata kelola desa partisipatif di Indonesia (Antlöv & Wetterberg, 2022). Oleh karena itu, efektivitas strategi politik Bupati Ibrahim Ali dapat dinilai dari kemampuannya mengonversi legitimasi dan kewenangan politik menjadi kapasitas pemerintahan yang menghasilkan pembangunan desa yang responsif, efektif, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Strategi politik Bupati Ibrahim Ali dalam pembangunan desa di Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan melalui integrasi antara perumusan kebijakan pembangunan, komunikasi politik, koordinasi kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan mobilisasi sumber daya. Strategi tersebut diwujudkan melalui penguatan perencanaan pembangunan secara partisipatif, komunikasi intensif dengan pemerintah desa dan masyarakat, koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemangku kepentingan, dan dukungan terhadap program pembangunan desa. Strategi tersebut berkontribusi terhadap penguatan pembangunan desa, terutama pada aspek infrastruktur dasar, pelayanan publik, peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur, serta pengembangan kemandirian desa.

Namun demikian, efektivitas strategi tersebut masih dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, kapasitas aparatur, kondisi geografis, dan dinamika sosial-politik masyarakat. Pola hubungan koordinasi kelembagaan dan komunikasi politik kepala daerah dengan OPD, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan desa lainnya berlangsung secara vertikal, horizontal, dan partisipatif, dan berperan penting dalam membangun kepercayaan serta mendukung implementasi program pembangunan. Meskipun demikian, penguatan kelembagaan tetap diperlukan agar koordinasi tidak terlalu bergantung pada hubungan personal kepala daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan politik, komunikasi, koordinasi kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan mobilisasi sumber daya merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan desa di Kabupaten Tana Tidung. Keberlanjutan strategi tersebut memerlukan pelembagaan kebijakan dan penguatan kapasitas pemerintahan agar pembangunan desa tidak bergantung pada figur kepala daerah, tetapi dapat berjalan secara berkelanjutan dalam sistem pemerintahan daerah dan desa. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji model strategi politik ini secara komparatif pada daerah otonom baru lain di Indonesia guna menguji generalisasi temuan.

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung perlu mempertahankan komitmen terhadap pembangunan desa dengan meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, mekanisme koordinasi dan komunikasi antarlembaga perlu dilembagakan secara formal agar keberlanjutan pembangunan tidak bergantung pada hubungan personal kepala daerah.

Pemerintah desa juga perlu memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat serta mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kemandirian desa, di samping meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Masyarakat diharapkan menjaga nilai gotong royong, solidaritas, dan harmonisasi sosial serta menghindari konflik politik yang dapat menghambat pembangunan desa.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. (2026). Sistem pengawasan internal pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung dalam perspektif prinsip good governance. *Jurnal Akta Yudisia*, 11(1), 95–118.
- Alim, M. S. (2024). *Ilmu politik & kebijakan publik*. Mega Press Nusantara.

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Antlöv, H., & Wetterberg, A. (2022). Indonesia's new developmental state: Interrogating participatory village governance. *Journal of Contemporary Asia*, 54(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/00472336.2022.2089904>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., & Qomariyah, P. (2014). Desa membangun Indonesia. *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*.
- El Yana, K. (2025). *The governance game: Strategi dan taktik dalam politik pemerintahan*. Publica Indonesia Utama.
- Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2023). Village government's risk management and village fund administration in Indonesia. *Sustainability*, 15(24), 16706. <https://doi.org/10.3390/su152416706>
- Hariyati, D., Holidin, D., & Mulia, I. C. (2021). Centralized local development versus localized central arrangement in village autonomy policy implementation in Indonesia. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 27(2), 88–99. <https://doi.org/10.20476/jbb.v27i2.11275>
- Locke, K. (2002). The grounded theory approach to qualitative research. In F. Drasgow & N. Schmitt (Eds.), *Measuring and analyzing behavior in organizations* (pp. 17–43). Jossey-Bass.
- Marwantho, M. (2021). *Strategi pengembangan desa menuju desa mandiri di Kabupaten Tana Toraja* (Tesis). Universitas Hasanuddin.
- McNair, B. (2017). *An introduction to political communication* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315624421>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mintzberg, H. (1978). Patterns in strategy formation. *Management Science*, 24(9), 934–948. <https://doi.org/10.1287/mnsc.24.9.934>
- Nimmo, D. (2008). *Komunikasi politik: Komunikator, pesan, dan media*. Remaja Rosdakarya.
- Ruhyanto, A. (2025). Analysing and explaining variation in village governance regimes across Indonesia. *South East Asia Research*. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483168>